

BAB II

KARAKTERISTIK KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Akhir Perang Dingin merupakan tonggak sejarah. Akhir Perang Dingin telah menjadi saat yang membingungkan karena hal ini mengakhiri tatanan containment (siasat pencegahan perluasan kekuasaan politik, militer, ekonomi atau ideology musuh). Era pasca Perang Dingin membuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengalami perubahan-perubahan penting karena selama lebih dari setengah abad kebijakan luar negeri Amerika Serikat berhadapan dengan ancaman luar yang muncul dari fasisme, komunisme, Perang Dunia II dan Perang Dingin. Pasca Perang Dingin, aktor-aktor penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengalami perubahan, tidak lagi hanya presiden yang mendominasi proses pengambilan kebijakan luar negeri.

Kemudian sejak runtuhnya komunisme di akhir dekade 90-an. Hubungan internasional mengalami perubahan yang mendasar episode bersejarah ini ditandai dengan tampilnya Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya, sekaligus menegaskan keunggulan kapitalisme sebagai pemenang yang telah berhasil mengalahkan komunisme. Keadikuasaan tunggal yang dimiliki Amerika Serikat ini kemudian identik dengan hegemoni yang senantiasa diusung oleh para perumus kebijakan luar negeri Amerika Serikat demi mencapai tujuan imperium Amerika Serikat.

Tragedi yang membuat Amerika Serikat berubah dalam menerapkan kebijakan luar negerinya adalah tragedi WTC. Tragedi tersebut membuat Amerika Serikat di bawah Presiden Bush seolah-olah paling berkuasa dan mengintervensi

negara-negara lain di penjuru Bumi dengan dalih perang melawan terorisme. Setelah Bush lengser dari kursi kepresidenan, Amerika Serikat mempunyai Presiden Baru yaitu Obama yang dianggap oleh dunia akan mengembalikan kebijakan Amerika Serikat kearah yang lebih bersahabat.

A. Tujuan Dasar Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Ciri utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat sejak 1940-an telah dibentuk dengan dua strategi besar yang telah membangun tatanan internasional modern. Salah satunya adalah paradigma realis, yang berkisar tentang pencegahan perluasan kebijakan luar negeri musuh, penghadangan, dan pemeliharaan kekuasaan kekuatan global. Strategi ini menghasilkan kelembagaan dan kemitraan untuk Amerika Serikat. Kelembagaan yang paling penting adalah NATO dan aliansi Amerika Serikat-Jepang. Dua kelembagaan yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini telah berhasil bertahan hingga akhir Perang Dingin dengan menghadirkan stabilitas melalui komitmen dan jaminan. (Halperin & Clapp, 2006, hal. 71)

Amerika Serikat mempertahankan kehadiran yang mencolok di Eropa dan Asia Timur. Partner-partner aliansinya mendapat perlindungan keamanan dan juga hubungan yang berkesenambungan dengan kekuatan militer terdepan dan terancang di dunia. Namun perimbangan Perang Dingin telah menghasilkan lebih dari sekedar struktur aliansi utilitarian, ia juga membentuk tatanan politik yang memiliki nilai di dalam dirinya sendiri.

Adapun paradigma yang lain yang dianut Amerika Serikat selain realis pada Perang Dingin II ketika Amerika Serikat merencanakan rekonstruksi ekonomi dunia yaitu paradigma liberal. Strategi paradigma ini ingin membangun tatanan di seputar hubungan politik yang sudah dilembagakan di antara pasar-pasar negara demokrasi, yang didukung oleh pembukaan ekonomi yang bebas. Apa yang mendasari strategi ini adalah pandangan bahwa tatanan internasional yang berbasis aturan, terutama di dalamnya Amerika Serikat menggunakan kekuatan politiknya untuk mendapatkan aturan-aturan yang cocok, sehingga aturan yang dibuat akan sangat melindungi kepentingannya, memaksakan kekuatan, dan memperluas pengaruh Amerika Serikat di dunia.

Dua paradigma strategi Amerika Serikat yaitu realis dan liberal berakar dari tradisi intelektual yang sebenarnya berlainan, bahkan berlawanan. Namun, selama 50 tahun terakhir kedua strategi itu telah bekerja dengan sangat baik. Paradigma strategi realis menciptakan sebuah alasan politik untuk membentuk komitmen keamanan besar di seluruh dunia. Sedangkan, paradigma strategi liberal menghadirkan agenda positif untuk kepemimpinan Amerika Serikat dengan maksud Amerika Serikat dapat menjalankan kepentingan nasionalnya, namun ia melakukannya dengan sedemikian rupa sehingga memperkuat tatanan komunitas internasional dan membuatnya stabil.

Amerika Serikat di awal milenium baru ini menikmati keadidayaannya yang bahkan belum pernah dirasakan oleh imperium besar sekalipun pada permulaan sejarah. Amerika Serikat bisa memiliki dominasi yang tak tertandingi di seluruh penjuru dunia. Bahkan militer Amerika Serikat tersebar di seluruh penjuru dunia.

Pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat ini nantinya akan sangat untuk melakukan tindakan cepat atas nama perdamaian. Hal ini juga telah menjadi kebutuhan militer yang permanen bagi Amerika Serikat.

Untuk pertama kalinya sejak awal Perang Dingin sebagai strategi besar baru muncul di Amerika Serikat. Strategi ini muncul terutama sebagai tanggapan terhadap terorisme, namun hal itu juga merupakan pandangan yang lebih luas mengenai bagaimana Amerika Serikat seharusnya menggunakan kekuatan dan mengatur tatanan dunia. Strategi ini kemudian terkristal oleh tragedi 11 September 2001 yang selanjutnya telah dimanfaatkan oleh Bush, Presiden Amerika Serikat sebelum Obama untuk mengalihkan kelemahan-kelemahan pengaturan politik dan ekonomi dalam strategi Amerika Serikat. Bahkan peledakan menara kembar WTC tersebut dieksploitasi secara politis yang efeknya disusunlah dasar-dasar kebijakan baru yang dibangun berdasarkan pondasi dan titik tolak baru. Dari sinilah muncul paradigma *War on Terrorism*. (Bush, 2001) Disusul dengan aksi militer Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak.

Sebenarnya pasca Perang Teluk II rancangan kebijakan baru ini dari dulu telah ditawarkan oleh Joe Biden yang saat itu menjabat sebagai senator hubungan luar negeri. Kala itu Biden menawarkan proposal strategi yang di sebut Pax Americana. (Wolfowitz, 2000) Beberapa alasan untuk membentuk Pax Americana sebagai berikut.

Pertama, Sebuah komitmen mendasar untuk mempertahankan sebuah dunia unipolar di mana Amerika Serikat tak memiliki pesaing yang seimbang.

Kedua, Analisis baru mendapati hasil mengenai ancaman global dan bagaimana mereka harus diserang.

Ketiga, Ancaman hari ini bukanlah negara besar lain yang harus dihadapi melalui serangan senjata nuklir balasan, melainkan jaringan teroris trans atlantic yang tak punya alamat. Untuk menghadapi kekuatan baru ini perlu dilakukan dengan cara pencegahan dan mungkin bahkan preventif.

Keempat, pendefinisian kembali pengertian kedaulatan. Hal ini dikarenakan kelompok teroris ini tak bisa dihadang. Amerika Serikat harus siap untuk campur tangan di mana pun dan kapan pun untuk menghancurkan ancaman. Teroris tak menghormati batas-batas negara, sehingga Amerika Serikat pun tak perlu menghormatinya.

Kelima, Berkurangnya penghargaan secara umum terhadap aturan internasional, traktat, dan kemitraan keamanan. Poin ini muncul dikarenakan oleh kecurigaan yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai mencurigakan dari kesepakatan internasional itu sendiri.

Keenam, Amerika Serikat akan memainkan peran langsung dan tak terbatas dalam menghadapi ancaman. Pendirian ini didasarkan sebuah penilaian bahwa tak ada negara atau koalisi bahkan Uni Eropa yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan kekuatan menghadapi teroris atau negara-negara teroris di seluruh dunia.

Ketujuh, pandangan dari kubu unilateralis terhadap tradisi masa lalu harus ditinggalkan Amerika Serikat. Di dunia baru yang menantang ini, para pemikir

neoimperial menyatakan bahwa paradigma besar realis dan liberal yang lama tak banyak membantu.

Namun pada saat itu tawaran Biden ini banyak mendapat kritik sehingga tidak bisa diterapkan. Salah satu anggota Senat saat itu Senator Robert Byrd berpendapat bahwa, akan sangat bagus bila Amerika Serikat menjadi negara adidaya satu-satunya di dunia dan sangat ingin tetap seperti ini namun tentu saja tidak bersedia untuk menempatkan proposal ini sebagai strategi baru dengan resiko mengorbankan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Tujuh tahun setelah Joe Biden dikritik habis-habisan atas proposal yang diajukannya. Para kritikus Biden saat itu tampak nyaman dalam menerapkan ide Pax Americana. Mereka bahkan mendukung intervensi militer Amerika Serikat di Haiti, Rwanda, dan Timor Timur (sekarang Timor Leste). Ketakutan akan menurunnya ekonomi Amerika Serikat sama sekali tidak terlihat. Seolah mengamini pendapat Biden saat itu.

B: Aktor-Aktor Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat.

Hubungan internasional tidak bisa terlepas dari aktor-aktor yang memungkinkan terjadinya sebuah kebijakan luar negeri. Aktor-aktor ini memainkan peranan yang penting dalam proses pembuatan, pengambilan, hingga penerapan kebijakan luar negeri. Setiap aktor memiliki tugas dan kapasitas yang berbeda namun tetap dalam bingkai tujuan yang sama.

1. Presiden

Presiden adalah salah satu aktor yang mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat. Sepanjang Perang Dingin, kekuasaan Presiden Amerika Serikat dalam proses pembuatan keputusan kebijakan luar negeri cenderung dominan. Walaupun Amerika Serikat sebenarnya telah mengatur untuk menghindari kekuasaan perseorangan. Namun tetap saja Presiden Amerika Serikat memberikan pengaruh-pengaruh tertentu. Pengaruh-pengaruh ini sebagian besar didasarkan pada latar belakang partai yang mengusung Presiden tersebut. Rakyat Amerika Serikat juga sangat paham kecenderungan presiden yang berasal dari partai Demokrat dan Republik. Kebijakan yang ke arah ofensif biasanya ditunjukkan oleh presiden dari Partai Republik. Sebaliknya presiden representasi Partai Demokrat cenderung menerapkan kebijakan-kebijakan anti-perang.

"Some members of Congress also see their role as supporting the president if he is from their political party and hence view issues through that lens. Others have strong ideological positions that affect how they see specific issues."(Halperin & Clapp, 2006, hal. 333)

Halperin menyebutkan bahwa ideologi partai pengusung sangat mempengaruhi perilaku anggota Kongres dari partai pengusung yang sama dengan presiden. Keduanya cenderung akan bekerjasama. Anggota Kongres jelas akan mendukung apapun prioritas presiden.

Kebijakan Obama sebagai presiden dari partai Demokrat dalam politik luar negerinya cenderung lebih lunak dan mengedepankan diplomasi. Fokus utama Obama terhadap dunia internasional adalah promosi demokrasi dan penegakan

hak-hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah pada saat pidato kepresidenan Amerika Serikat pada tanggal 19 Mei 2011 di mana Obama kembali menegaskan tentang kampanye demokrasi dan HAM untuk kebijakan luar negerinya di Timur Tengah dan Afrika Utara (Office of the Press Secretary, 2011). Obama juga cenderung bersahabat dengan pemerintahan-pemerintahan Muslim. Dia menjelaskan bahwa Islam bukanlah musuh Amerika Serikat begitu pula sebaliknya. Hal ini dilakukan Obama untuk mereduksi stigma anti-amerika yang selama ini tertanam di komunitas muslim dunia. Selain itu langkah Obama bekerja sama dengan pemimpin Islamis Mesir Mohammad Morsi juga bisa dikatakan sebagai bentuk upaya rekonsiliasi Amerika Serikat dan Islam.

2. Departemen Luar Negeri

Departemen ini merupakan bagian penting lain dari birokrasi politik luar negeri Amerika Serikat. Selain itu, Departemen Luar Negeri ini juga merupakan badan resmi pemerintah Amerika Serikat. Departemen ini mengendalikan jaringan kantor-kantor perwakilan luar negeri yang dipimpin dan dikelola oleh para diplomat dan tersebar di seluruh penjuru dunia. (Halperin & Clapp, 2006, hal. 108)

Peran Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga tidak kalah penting dibanding aktor lainnya. Departemen luar negeri bertugas menjadi perwakilan untuk semua kegiatan luar negeri Amerika Serikat di negara tujuan seperti melaksanakan program bantuan asing, melawan kejahatan internasional, program pelatihan militer asing, dan banyak lagi. Kegiatan luar negeri ini adalah kunci untuk mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat. Selain itu ada

beberapa tugas penting dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam mempromosikan dan melindungi kepentingan warga negara Amerika Serikat dengan:

1. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas di wilayah vital/krisis;
2. Menciptakan lapangan pekerjaan di negara tujuan dengan membuka pasar luar negeri;
3. Membantu negara-negara berkembang dengan membangun lingkungan ekonomi yang stabil yang memberikan peluang investasi dan ekspor bagi pengusaha Amerika Serikat;
4. Bertugas mengarahkan dunia untuk mengatasi masalah-masalah global seperti polusi lintas batas, penyebaran penyakit menular, terorisme, penyelundupan nuklir, dan krisis kemanusiaan.

Sebagai perwakilan pemerintah di luar negeri, Departemen Luar Negeri memiliki peran utama dalam:

1. Memimpin koordinasi di dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan luar negeri;
2. Mengelola anggaran urusan luar negeri dan sumber daya lainnya dalam urusan luar negeri;
3. Memimpin dan mengkoordinasikan perwakilan luar negeri Amerika Serikat, menyampaikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat kepada pemerintah asing dan organisasi internasional melalui Kedutaan dan Konsulat Amerika Serikat di

luar negeri dan juga kegiatan diplomatik untuk organisasi internasional;

4. Melakukan negosiasi dan menyimpulkan kesepakatan dan perjanjian pada isu-isu mulai dari perdagangan hingga senjata nuklir;
5. Mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan internasional lembaga Amerika Serikat.

Kewajiban Departemen Luar Negeri pada warga negara Amerika Serikat di luar negeri meliputi:

1. Melindungi dan membantu warga Amerika Serikat yang tinggal atau bepergian ke luar negeri;
2. Membantu bisnis Amerika Serikat di pasar internasional;
3. Mengkoordinasikan dan memberikan dukungan untuk kegiatan internasional lembaga Amerika Serikat non-federal (individu, lokal, negara bagian), mengkoordinir kunjungan resmi luar negeri di negara tujuan, juga upaya-upaya diplomatik lainnya.
4. Menjaga informasi tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan dengan negara-negara lain dan memberikan laporan untuk pejabat pemerintah.

Dari apa yang disebutkan diatas, hampir semua kegiatan luar negeri Amerika Serikat mulai dari kunjungan individu sampai presiden, kegiatan diplomasi, ekonomi internasional, bantuan militer, pertemuan-pertemuan internasional, hingga perjanjian internasional akan di koordinasi oleh Departemen

Luar Negeri. Artinya semua informasi resmi pemerintah baik yang keluar maupun masuk ke dalam Amerika Serikat harus melalui kabel diplomatik Departemen Luar Negeri. Peran ini menjadikan Departemen Luar Negeri sebagai ujung tombak dalam negosiasi yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Hal ini bukan dilakukan tanpa alasan melainkan karena Amerika Serikat menginginkan jalur informasi yang terpusat sehingga tidak ada kemungkinan bocornya informasi ke pihak musuh. Meski demikian beberapa informasi sensitif milik Departemen Luar Negeri dan NSA banyak dibocorkan oleh mantan Kontraktor NSA Edward Snowden. Hillary Clinton menyebutkan kebocoran ini menyebabkan memanasnya hubungan Amerika Serikat dengan Rusia dan China. (Akbar, 25) Akses akan informasi penting ini menjadikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sangat penting dalam perumusan kebijakan luar negeri.

3. Departemen Pertahanan

Departemen ini lebih sering dikenal sebagai Pentagon merupakan gabungan dari departemen Peperangan dan Departemen AL. Tujuan utama pembentukan departemen ini adalah untuk menunjukkan supremasi sipil atas militer. Penaruh departemen ini terhadap pembuatan keputusan politik luar negeri tak terhindarkan, fokus perhatian yaitu konflik regional, prolifasi nuklir, bahaya transnasional (terrorisme, penyelundupan senjata), Dan menjadi pelaksana bantuan militer Amerika Serikat ke negara-negara sekutunya.(Sharp, 2015, hal. 18)

Dalam kapabilitas militer yang sangat besar ini membuat Amerika Serikat tidak bisa menghindarkan diri dari campur tangan militer atas kebijakan luar negerinya. Dengan pertimbangan strategi kemiliteran dari pentagon, maka Amerika Serikat bisa menentukan untuk menerapkan kebijakannya baik dengan instrumen militer atau yang lainnya. Seperti bantuan militer yang diberikan kepada negara sekutunya, semuanya bukanlah bantuan yang bersifat mulai atau semacamnya. Untuk diketahui, bahwa bantuan militer Amerika Serikat kepada sekutunya tidak pernah berbentuk dana segar. Semua persenjataan di beli oleh militer Amerika Serikat dengan dana yang telah di sepakati Kongres dari perusahaan penghasil senjata militer, biasanya perusahaan lokal Amerika Serikat sendiri. (Sharp, 2015, hal. 18) Namun pembelian dilakukan atas nama negara yang akan menerima bantuan. Begitu pula untuk pendidikan para perwira militer. Hingga pembangunan fasilitas militer untuk sekutunya, semua di bawah kendali langsung Pentagon. Maka dapat disimpulkan bahwa walaupun Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada sekutunya, bukan berarti Amerika Serikat melepasnya begitu saja. Amerika Serikat juga tetap memegang kendali yang kuat atas kegiatan militer sekutunya. Sehingga pada saatnya Amerika Serikat bisa menggunakan atau memanfaatkan militer negara sekutunya untuk tujuan tertentu.

4. Kongres dan Kelompok Kepentingan.

Secara garis besar ada tipe aktor dalam hubungan internasional, yaitu aktor negara dan aktor non negara. (Perwita & Yani, 2006, hal. 11) Kelompok Kepentingan ini mempengaruhi proses pembuatan politik luar negeri Amerika

Serikat melalui Kongres. Aktor non negara ini terdiri dari aktor individu maupun organisasi internasional.

Kongres adalah badan legislative yang pertama kali disebut dalam konstitusi Amerika Serikat dan yang paling berwenang menyatakan perang. Dengan demikian, Kongres memang secara konstitusional memiliki otoritas dalam bidang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat. Kongres juga merupakan gabungan dari Senat dan House of Representatives, wewenangnya antara lain adalah menyatakan perang, mengembangkan kemiliteran, menarik pajak dan lain-lain.

Dalam pemilihan anggota Kongres baik dari Senat maupun House of Representatives, para kandidat akan sangat memerlukan dukungan dana dari masyarakat untuk memenangkan kursinya, dalam hal ini yaitu kelompok kepentingan. Maka sangatlah mungkin terjadinya hubungan timbal balik antara anggota Kongres dan kelompok kepentingan. Beberapa kelompok kepentingan yang cukup sering terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah Human Right Watch, Amnesty International, Rotary International, The Roman Catholic Church, AIPAC atau *American Israel Public Committee* (Republika, 2012), dan lain-lain.

5. Media Massa

Massa juga mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, dalam hal ini mengacu pada opini publik yang dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan pada saat menyusun kebijakan luar negeri. Dalam sistem politik terbuka opini

publik lebih terbebas dari manipulasi. Jika dalam sistem politik tertutup media massa akan cenderung dibungkam atau dikendalikan oleh pemerintah. Disaat yang sama dengan adanya media massa yang terbuka ini para pengambil kebijakan dapat membangun opini publik untuk mendukung kebijakan-kebijakan luar negerinya.(Coplin, 1992, hal. 90)

Dengan kata lain kebijakan luar negeri Amerika Serikat hanya bisa dilaksanakan bila mendapat dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat, entah ide awal muncul dari keresahan rakyat atau manufer kebijakan yang dilontarkan oleh pengambil kebijakan kepada publik. Dalam logika sederhana, semisal presiden memiliki sebuah kebijakan namun mendapat kendala ketika menghadapi Kongres, maka presiden bisa memanfaatkan media untuk menggalang dukungan dari para pendukungnya sehingga Kongres tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya.

C. Politik Luar Negeri Amerika Serikat Di Era George Bush Jr.

Naiknya George W.Bush dari Partai Republik yang lebih condong kepada politik unilateralis pada Januari 2001 telah membuka era baru dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sebelumnya dijabat oleh Bill Clinton dari Partai Demokrat yang cenderung multilateralis. Politik multilateralis seperti yang ditunjukkan oleh Bill Clinton cenderung mengedapankan pada nilai-nilai kerjasama dan diplomasi internasional untuk mencapai kepentingan Amerika Serikat di dunia. Berbeda dengan dengan multilateralis, kebijakan unilateralis era Bush cenderung mengandalkan cara-cara militer untuk mencapai kepentingan

nasional Amerika Serikat dan menjaga hegemoninya di dunia untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai pemimpin-negara di dunia.

Runtuhnya menara kembar WTC dan rusaknya gedung Pentagon pada tanggal 11 September 2001 yang disinyalir dikarenakan oleh ulah terorisme bernama Al Qaeda merupakan kunci utama legitimasi kembalinya unilateralisme Amerika Serikat. Perang terhadap terorisme global dan senjata pemusnah massal dijadikan trademark pemerintahan Bush. Selanjutnya kebijakan keras dengan mengandalkan kekuatan militer Amerika Serikat pun dijalankan terhadap negara-negara yang dianggap Amerika Serikat sebagai negara jahat. negara-negara yang tidak mau tunduk terhadap dikte dan dominasi Amerika Serikat seperti Iran, Korea Utara, Libya, dan Syria secara khusus dikategorikan Bush sebagai negara poros setan.

Perilaku Politik Amerika Serikat yang unilateralis ini sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh tragedi WTC saja, namun juga disebabkan faktor lain yaitu sekelompok orang di dalam pemerintahan Bush yang disebut neokonservatif. Pandangan politik neokonservatif yang menaungi politik global Amerika Serikat pada era presiden Ronald Reagan pada tahun 1997 saat berdirinya sebuah institusi pemikiran (think tank) *Project for New American Century (PNAC)*.¹ Institusi ini adalah organisasi non-profit yang tujuannya mempromosikan kepemimpinan global Amerika Serikat. Selain PNAC terdapat pula pendukung politik neokonservatif lainnya yaitu *American Enterprise Institute (AEI)*.

¹<https://oldamericancentury.com/> "Project for New American Century", Website ini adalah website Organisasi yang mengkampanyekan kebijakan konservatif dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat diakses pada 12 Juni 2015

Secara garis besar, pandangan mengenai politik neokonservatif orang-orang di sekitar Bush itu dilandaskan pada asumsi pada penggunaan kekuatan militer dan melakukan politik unilateralis dalam mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat demi mencegah tindakan atau ancaman dari negara-negara autokrasi dan rezim berbahaya serta aktor-aktor non-negara seperti terorisme internasional. Landasan politik neokonservatif orang-orang sekitar Bush ini tertuang dalam dua dokumen yang punya hubungan erat. Dokumen pertama yaitu *National Security Strategy* (NSS) yang disebarluaskan oleh pemerintah Bush pada September 2002. (Mahajan, 2005, p. 19) Dan dokumen kedua yaitu *Rebuilding American's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century* (RAD) yang diterbitkan oleh PNAC media pada September 2000.

Dari kedua dokumen tersebut, terdapat prinsip-prinsip utama dari neokonservatif, yaitu:

1. Transformasi militer, yakni anggaran belanja yang sangat besar untuk lebih meningkatkan teknologi militernya sehingga superioritas Amerika Serikat dalam segi persenjataan semakin tak tertandingi.
2. Basis militer, yakni menjaga keberlangsungan ekspansi kehadiran militer Amerika Serikat secara lebih luas lagi sampai ke seluruh penjuru dunia dengan cakupan yang lebih luas daripada yang telah dicapainya saat ini. Amerika Serikat harus mencari dan menetapkan jaringan 'pangkalan militer' atau 'basis operasi' di pos-pos terdepan untuk meningkatkan daya jangkau pasukannya, baik yang telah ada

saat ini maupun yang ditempatkan di pos-pos barunya di masa depan".

3. Pergantian rezim, yakni membentuk pemerintahan yang diinginkan di negaranegara yang sangat bergantung pada kehadiran militer Amerika Serikat dan menjadikan mereka di bawah kontrol Amerika Serikat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu diperlukan seperangkat strategi transformasi militer yang mampu menangani dan mengendalikan situasi di negaranegara tersebut pada saat pergantian rezim serta pada saat pendudukan militer semasa pasca perang.

Prinsip prinsip ini dapat dijalankan dengan masif karena pemerintahan Bush menyandarkan kebijakan luar negeri pada kerangka realis di mana pasca 11 September 2001 ancaman terorisme dan senjata pemusnah massal setiap saat dapat terjadi. tragedi 11 September 2001 telah berhasil menegaskan kembalinya unilateralisme Amerika Serikat dibawah pengaruh neokonservatif di pemerintahan Bush dan memaksa Bush untuk menelurkan doktrin pre-emptive strike, doktrin yang membenarkan Amerika Serikat untuk menghancurkan pihak manapun yang berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. hal itu ditandai dengan pidato yang disampaikan di ruang oval gedung putih:

" we will make no distinction between the terrorist who committed this acts and those who harbor them. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world and we stand together to win the war against terrorism".(september11news.com).

Kemudian dilanjutkan lagi dengan pidato Bush selanjutnya dihadapan Kongres pada tanggal 20 September 2001. Pidato tersebut menandai dimulainya perang melawan terorisme, yang merupakan landasan bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang unilateralis dalam melawan terorisme di seluruh dunia.

" Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated. Every nation in every region now has a decision to make: either you are with us, or you are with the terrorist. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime".(september11news.com, 2015)

Prinsip neokonservatif yang tertuang dalam dokumen NSS dan RAD juga didukung dengan hegemoni Amerika Serikat, terutama dalam penggunaan ekonomi dan militer secara unilateral. Selain alasan itu, politik dari neokonservatif juga identik dengan kepentingan Yahudi atau negara Israel. Hal yang sangat menonjol dari neokonservatif tersebut adalah dominannya peranan politikus Amerika Serikat-Yahudi dalam mempengaruhi dan menjadi pengambil kebijakan luar negeri dan pemerintahan Amerika Serikat.

Tokoh Yahudi-Amerika Serikat yang menonjol sekaligus radikal pada pemerintahan Bush adalah Richard Perle dengan julukan (The Prince of Darkness) yang menjabat sebagai ketua *Defense Policy Board* link utama dari pembuat kebijakan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat.(Wikipedia, n.d.)William

Kristol, pendiri dan presiden PNAC sebagai intelektual yang menelurkan pemikiran-pemikiran neokonservatif di Amerika Serikat. Serat banyak lagi aktor-aktor kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang cenderung ke arah neokonservatif dan mewedahi kepentingan Israel. Kelompok neokonservatif ini secara spektakuler berhasil mempengaruhi penggunaan kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat. Salah satu kerja keras mereka adalah mulai dari meruntuhkan rezim Saddam Husein di Irak atas dasar penegakan HAM, demokrasi dan menghancurkan senjata pemusnah massal yang hingga sekarang tak pernah ditemukan.

D. Obama Dalam Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat.

Akhir tahun 2008 yang telah lewat, dunia seolah terpeku pada perkembangan di Amerika Serikat. Ada dua persoalan penting yang diyakini telah berpengaruh besar pada dunia internasional yaitu krisis ekonomi dan pemilihan presiden Amerika Serikat. Krisis yang membelit Amerika Serikat menjalar ke berbagai negara dan membuat kelesuan perekonomian dunia. Lewat pemilihan presiden baru itulah dunia berharap krisis sedikit demi sedikit bisa membaik. Pada pemilihan presiden itu, ada dua kandidat pertarung sengit yakni Barack Obama dari Parta Demokrat dan John McCain dari Partai Republik. Publik menilai McCain memiliki kecendrungan mewarisi kebijakan Presiden Bush, cerita ini membuat McCain hancur karena kebijakan-kebijakan unilateralis Bush dianggap telah mengakibatkan krisis ekonomi Amerika Serikat. Pesaingnya adalah Obama, tampil dengan ide-ide baru dan segar. Obama mengkampanyekan paket kebijakan

ekonomi yang diusulkannya adalah yang terbaik bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah, salah satunya yaitu insentif pemotongan pajak USD 3000 jika pengusaha mampu membuka lapangan kerja baru. Selain itu, seperti yang telah diketahui oleh umum bahwa calon Demokrat biasanya akan lebih mengedepankan kerjasama diplomasi dibanding penggunaan militer membuat Obama lebih bisa diterima oleh publik Amerika Serikat. Hal-hal itulah yang menjadikannya keluar sebagai pemenang dalam pemilu Amerika Serikat tahun 2008.

Kemenangan Obama mendapat sambutan luas dari dunia internasional. Para tokoh dunia menyambut baik kemenangan Obama. Mereka optimis kepemimpinan Obama akan mendatangkan perbaikan terhadap persoalan dunia, baik ekonomi, lingkungan, maupun keamanan (terkait terorisme). Kemenangan Obama dianggap sebagai era baru perubahan wajah kekuatan negara adidaya tersebut dalam menjalankan perannya di dunia. Janji-janji kampanye Obama yang lebih ramahlah yang berhasil memenangkannya melaju ke gedung putih.

Berikut adalah janji kampanye Obama saat masih menjadi calon presiden pada tahun 2008:

1. Bidang politik

Obama menjanjikan pada masa awal pemerintahannya untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Fokus adalah menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Selain itu, Obama juga berjanji untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari

Irak hingga tenggat waktu 2011 mendatang. Kebijakan politik Obama juga dijanjikan akan lebih dekat dengan sejumlah negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Dia juga berjanji untuk berpidato di salah satu negara mayoritas Islam, meski tidak menyebut di mana negara tersebut.

Yang tak kalah menariknya adalah penutupan penjara Guantanamo di Kuba, Amerika Serikat Selatan (latin). Meskipun penutupan penjara ini masih dikhawatirkan akan kembali maraknya serangan teror kepada Amerika Serikat.

2. Luar Negeri

Obama menempatkan mantan pesaingnya di pencalonan presiden dalam konvensi Partai Demokrat, Hillary Clinton sebagai menteri luar negeri. Posisi ini cukup penting memang jika dinilai dari kapasitas Amerika Serikat sebagai negara besar. Begitu ditunjuk Obama sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat, Hillary mengatakan, Amerika Serikat ke depan akan “berwajah” lebih ramah. “Kita akan mengedepankan diplomasi,” ujar Hillary yang disambut positif para pendukung Obama.

3. Energi

Obama dan pesaingnya, John McCain sama-sama memiliki agenda yang sama terkait bidang energi. Obama sepakat untuk dilakukan kebijakan penggunaan energi yang terbarukan. Bahkan, target Obama pada 2010, semua

masyarakat Amerika Serikat sudah menggunakan energi terbarukan tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi dalam kehidupan sehari-hari.

4. Automotif

Industri automotif Amerika Serikat boleh dibilang sebagai urat nadi perekonomian Amerika Serikat. Karena itu, ketika industri ini nyaris koleps, Obama berjanji membantu untuk mencari dukungan dana kepada tiga perusahaan automotif terbesar di Amerika Serikat, General Motors, Ford, dan Chrysler.

5. Ekonomi

Presiden Barack Obama hanya meneruskan kebijakan pemerintahan Bush, untuk memberikan bailout ke sejumlah sektor. Tapi, Obama hanya meminta kepada warga Amerika Serikat untuk bisa realistis dan berhemat, karena terpaan krisis global yang cukup sulit.

Semua prinsip dasar kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pimpinan Obama itu dicetuskan oleh lima belas orang penting yang berada dalam lingkarannya. Kelima belas orang ini duduk menjadi tim penasehat keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi. Untuk penasehat keamanan ada enam tokoh yang akan selalu menemani Obama. Keenam tokoh ini umumnya menolak perang dan memntingkan diplomasi dan negosiasi, kan tetapi tegas terhadap terorisme dan anarki global.(Lake, 2008) Keenam orang penasehat itu adalah:

1. Dennis McDonough, coordinator penasihat keamanan dalam kampanye Obama dan menjadi orang yang paling keras mengenai penarikan pasukan di Irak untuk menyelamatkan defisit APBN dan membantu penyelamatan resesi ekonomi Amerika Serikat.
2. Richard Danzig, mantan menteri angkatan laut, pakar Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washington dan konsultan urusan bioterorisme pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
3. Jonathan Scott Cration, pensiunan marsekal muda aktif dalam MDG's OBB, veteran Perang Teluk 2001 dan mantan direktur markas besar pasukan Amerika Serikat di Eropa (USEROCOM). Dia yang mendesak Amerika Serikat untuk fokus mengejar Al Qaeda dan juga menuntut untuk penarikan pasukan Amerika Serikat di Irak.
4. Sam Nunn, mantan senator Georgia, seorang pakar perlucutan senjata dan diharapkan menjadi salah satu tokoh yang dapat mengatasi krisis nuklir dengan Korea Utara dan Iran.
5. William J. Perry, penasihat keamanan semasa presiden Clinton, seorang Profesor di Universitas Stamford yang secara terang-terangan penggunaan kekuatan militer di Irak.
6. Sarah Sewall, Spesialis kebijakan publik dari Universitas Harvard yang pernah menjadi Deputi Menteri Pertahanan didalam cabinet presiden Clinton ini adalah seorang pakar strategi militer utama Amerika Serikat.

Urusan kenijakan luar negeri, ada lima orang tokoh yang diproyeksikan Obama untu mengendalikan lingkaran kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan mereka sebagian dari mereka adalah penyokong demokratisasi, kerjasama internasional, multinasionalme dan penegakan HAM.(Staff Reporter of the Sun, 2008) Kelima orang penasehat kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu adalah:

1. Anthony Lake, mantan penaasehat semasa pemerintahan Clinton dan Profesor diplomasi di Universitas Georgetown. Dia adalah penyokong utama multinasionalisme PBB dan mendukung aktifitas terus menerus terhadap NATO.
2. Mark Lippert, penasehat kebijakan luar negeri Obama. Dia akan selalu hadir dalam pidato kenegaraan Obama mengenai permasalahan Internasional.
3. Susan E. Rice, seorang pakar ekonomi global. pembangunan dan kebijakan luar negeri. Dia juga seorang spesialis Afrika sekaligus pendukung sejumlah aksi kemanusiaan global.
4. George B. Craig, mantan orang dekat Bill Clinton, dia menginginkan Amerika Serikat berdekatan kembali dengan Amerika Latin yang cenderung memusuhi Washington.
5. Maeleine K. Albright, mantan Mentri Luar Negeri semasa pemerintahan Clinton. Dia aktif berkampanye dalam masalah kemanusiaan, demokratisasi dan HAM.

Untuk urusan ekonomi, dari keempat ekonom yang menjadi penasihat Obama memiliki sikap yang kurang selaras dalam menyikap permasalahan perdagangan global. Di satu sisi mendukung pasar bebas disisi lain menhendaki penerapan aturan untuk mendisiplinkan pasar. (Peters & Woolley, 2007) Bahkan keempatnya cenderung mengkampanyekan perlindungan terhadap pasar domestik. Mereka adalah:

1. Jason Furman, peneliti ekonomi senior di Brookings Institution yang pernah aktif di Bank dunia dan menjadi bawahan Mentri Keuangan Robert Rubin di dalam pemerintahan presiden Clinton. Dia adalah ekonom pendukung pasar bebas tetapi berpendapat bahwa membangun perekonomian domestik adalah fokus yang harus diambil ketika Amerika Serikat aktif dalam perdagangan bebas.
2. William M. Daley, ekonom yang terlibat dalam NAFTA.
3. Austan Goosbee, ekonom ulusan Universitas Chicago yang menjadi peneliti utama pada *National Bureau Economic Reserch*. Dia mendorong pasar mendukung pasar bebas namun mendorong penerapan aturan baru dalam transaksi ekonomi.
4. Daniel K. Tarullo, professor hukum dari Universitas Georgetown, Seorang spesialis di bidang hukum perdagangan internasional, hukum internasional dan hukum perbankan.

Pada saat terjadi krisis di timur tengah, Gedung Putih kembali menjelaskan mengenai sikap yang di ambil Amerika Serikat. Obama sebagai presiden Amerika Serikat dengan jelas mengatakan bahwa negaranya mendukung penuh dan menetapkan demokrasi sebagai prioritas utama mereka dalam arah kebijakannya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahkan Lebih jauh Amerika Serikat siap menerjemahkannya dalam usaha-usah diplomasi dan bantuan ekonomi. kemudian Amerika Serikat juga akan berusaha mewujudkan hak-hak universal salah satunya adalah “hak untuk memilih pemimpinnya sendiri” seperti yang di ucapkan oleh Obama pada 19 Mei 2011.(Office of the Press Secretary, 2011) Tiga bulan sebelumnya Husni Mubarak lengser dari jabatannya sebagai presiden Mesir setelah Demo besar-besaran selama 18 hari yang dilakukan oleh rakyat Mesir.

Pidato kepresidenan diatas bisa disimpulkan sebagai sebuah sambutan Amerika Serikat terhadap Mesir yang oleh militer Mesir sendiri diberikan waktu 6 bulan untuk menyusun konstitusi serta undang-undang baru yang lebih demokratis. Setelah kisruh yang cukup panjang dalam tubuh pemerintah, Mesir akhirnya memiliki presiden baru yang dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat Mesir. Secara garis besar tujuan Amerika Serikat terlihat berjalan lancar di Mesir. Investasi secara berkala akan membuahkan hasil menghadirkan demokrasi.